



2

**PERKEMBANGAN
STRATEGI**

DAN PERENCANAAN

**PEMBANGUNAN EKONOMI
INDONESIA**

A. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

Strategi pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :

- Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi
- Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect)-pendistribusian kembali.
- Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
- Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Strategi Pembangunan dengan pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan.

Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

- Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah; meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
- Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “.....teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gampang sekali bagai kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980).

Strategi yang berwawasan ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Strategi pendekatan kebutuhan pokok

Sasarana dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjtnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan 'Apa tujuan yang hendak dicapai...?'

Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan dipergunakan.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi).

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesiapun tidak mengesampingkan startegi pertumbuhan, dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III, dan seterusnya).

Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :

REPELITA I	<ul style="list-style-type: none"> ● meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA II	<ul style="list-style-type: none"> ● meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA III	<ul style="list-style-type: none"> ● meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA IV	<ul style="list-style-type: none"> ● meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Apapun definisi perencanaan pembagunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat perencanaan adalah :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi.

-
- Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi seminim mungkin
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
 4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya
 5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
 6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia.
 7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan
 8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode sebelum Orde baru, dibagi dalam :

Periode 1945 - 1950

Periode 1951 - 1955

Periode 1956 - 1960

Periode 1961 - 1965

Periode setelah Orde Baru, dibagi dalam :

Periode 1966 s/d 1958, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi

Periode Repelita I : 1969/70 - 1973/74

Periode Repelita II : 1974/75 - 1978/79

Periode Repelita III : 1979/80 - 1983/84

Periode Repelita IV : 1984/85 - 1988/89

Periode Repelita V : 1989/90 - 1993/94

Secara ringkas perkembangan rencana pembangunan dan strategi yang dipergunakan dapat dilihat dalam tabel berikut :

<p align="center">Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia</p>	<p align="center">Strategi Pembangunan Ekonomi</p>	<p align="center">Kebijaksanaan yang mendukung dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi</p>
<p>1. Periode 1945 - 1950</p> <p>a) Perencanaan Hatta (1947)</p> <p>b) Rencana Kasino, Plan Produksi Tiga Tahun RI 1948 - 1950</p> <p>c) Rencana Kesejahteraan Istimewa 1950 - 1951</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Periode 1945 - 1950 ini pada dasarnya masih merupakan periode revolusi, yaitu dalam situasi mempertahankan kemerdekaan yang diprok-lamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ● Periode 1945 - 1950, di Indonesia memberlakukan 2 Undang-Undang Dasar yakni: ● UUD 1945, yang berlaku dari Agustus 1945 - Desember 1949 ● Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang berlaku dari Desember 1949 - Agustus 1950 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● pasal 33 UUD 1945 <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kemakmuran rakyat dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui tenaga produktif 2. Jalan Industrialisasi dengan tetap mendasarkan diri sebagai negara agraris 	<p>Kebijaksanaan yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kebutuhan negara lain akan produk Indonesia masih tinggi, khususnya barang-barang pertanian sebagai bahan baku industri ● Barang sintesis belumilah dominan ● Fluktuasi harga barang ekspor Indonesia sewaktu mengalami kenaikan ● Pinjaman luar negeri, baik modal asing, merupakan pinjaman yang dianjurkan <p>Kebijaksanaan yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perekonomian Indonesia belum stabil sebagai akibat masa peralihan dari perekonomian penjajahan (Belanda dan Jepang) ke perekonomian kemerdekaan ● Infansi yang diakibatkan oleh tindakan Belanda yang tetap menginginkan Indonesia sebagai negara jajahannya, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ● Sangat tergantung pada fluktuasi tingkat harga barang ekspor Indonesia di pasar Internasional

<p>2. Periode 1951 - 1955</p> <p>Perencanaan urgensi perekonomian (1951) yang diusulkan oleh Sumitro Djojohadikusumo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Periode 1951 - 1955 merupakan periode pematangan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia telah diakui secara Internasional tetapi Irian Barat masih belum diserahkan oleh Belanda 		<ul style="list-style-type: none"> ● Kabinet yang silih berganti sebagai akibat situasi politik yang belum stabil (agresi Belanda tahun 1947 da 1948) sehingga tidak ada kebijaksanaan ekonomi yang berkesinambungan ● Terbatasnya dana saat itu ● Rencana yang belum/tidak dijabarkan dalam langkah-langkah yang kongkret misalnya dalam bentuk alokasi dana ● Perhatian pemerintahan masih ditekankan pada mempertahankan kemerdekaan dari serangan/agresi dari luar ● Rencana yang dibuat belum memiliki dasar politis
<p>2. Periode 1951 - 1955</p> <p>Perencanaan urgensi perekonomian (1951) yang diusulkan oleh Sumitro Djojohadikusumo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Periode 1951 - 1955 merupakan periode pematangan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia telah diakui secara Internasional tetapi Irian Barat masih belum diserahkan oleh Belanda 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak dirumuskan secara eksplisit <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan nilai kemakmuran masyarakat dengan cara : ● Mendorong berkembangnya industri-industri kecil ● Meningkatkan kemajuan badan-badan koperasi dan memperkuat organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan untuk usaha perniagaan kecil dan menengah 	<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perang Korea pada tahun 1951 yang mengakibatkan penerimaan Indonesia meningkat sehingga relatif ada dana (dikenal dengan istilah Korea - Boom) <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Infansi yang tidak dapat lagi dikendalikan sebagai akibat defisit Anggaran yang semakin meningkat ● Penggunaan surplus perdagangan yang tidak terarah

<ul style="list-style-type: none"> ● Pada periode ini Indonesia memberlakukan UUD sementara dari 15 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 yang pada dasarnya menggambarkan rapuhnya persatuan di antara bangsa Indonesia sendiri ● Rencana pembangunan Ekonomi ini hanya mencakup waktu 1951 dan 1952 ● Dari tahun 1952 - 1955 tidak ada rencana pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendorong berkembangnya industri berat yang akan menjadi unsur-unsur penyokong yang memudahkan dan memperkuat kemajuan perindustrian dalam negeri di daerah-daerah ● Peranan pemerintah diharapkan dominan dalam pelaksanaan rencana ini 	<ul style="list-style-type: none"> ● kebijaksanaan keuangan yang tidak mendorong berkembangnya investasi ● Kabinet masih silih berganti yang mengakibatkan tidak adanya rencana/program yang berkesinambungan ● Sifat rencana yang sangat pendek (hanya 2 tahun) dan tidak mempunyai dasar politis (tidak ada persetujuan DPR)
<p>3. Periode 1956 - 1960</p> <p>Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (RTLP) 1956 - 1960</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dalam periode ini kabinet masih silih berganti ● Sengketa Irian Barat yang semakin meningkat yang mengakibatkan dinasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda ● Perkembangan politik di dalam negeri semakin panas yang mengakibatkan perekonomian Indonesia berkembang ke arah yang tidak menentu 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Secara eksplisit tidak dirumuskan <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengalokasikan dana tahunan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan13 % 2. Untuk pengairan dan proyek-proyek multi purpose25 % 3. Untuk alat-alat perhubungan25 % 4. Pertambangan dan industri25 % 	<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Secara politis Rencana Undang-Undang tentang RLTP ini telah disetujui oleh DPR <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dalam pelaksanaan ternyata garis-garis besar rencana itu perlu dirubah, baik dalam target maupun dalam pembiayaan ● Rencana yang disusun tidak/kurang memperhatikan potensi yang ada ● Infasi yang semakin tidak terkendali sebagai akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang semakin besar

	<p>5. Untuk urusan sosial (pengajaran, kesehatan, perumahan dan sebagainya)12 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapat pemerintah dari ekspor sangat menurun sebagai akibat dari resesi ekonomi yang dialami Amerika Serikat dan Eropa Barat selama akhir 1957 dan permulaan 1958 ● Terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai manifestasi ketegangan antara pusat dan daerah, dengan perkataan lain stabilitas politik tidak ada. ● Kemampuan administratif untuk menjamin pelaksanaan rencana masih sangat rendah.
<p>4. Periode 1961 - 1965</p> <p>Perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 - 1965</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Periode ini diwarnai oleh perkembangan politik yang semakin panas (pembebasan Irian Barat, anati Malaysia dan juga konflik antar partai politik) ● Rencana ini terpaksa dihentikan di tengah jalan sebagai akibat adanya pemberontakan PKI tahun 1965 (Aksi G.30.S.PKI) 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Manifesto politik no. 1/1960 dan Deklarasi ekonomi 1963 <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan asas Ekonomi Terpimpin 	<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ada niat untuk membangun dengan suatu rencana yang jelas yang juga diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim dianut, yang antar lain tidak mempertimbangkan dana untuk membiayainya ● Defisit Anggaran yang semakin meningkat yang mengakibatkan hyperinflasi tahun 1965 (650 % per tahun) telah merusak sendi-sendi per-ekonomian secara menyeluruh

<p>5. Periode 1966 - 1969</p> <p>Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1966 -1969</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dengan pemberontakan PKI tahun 1965, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana praktis tidak berlaku lagi ● Setelah pemberontakan PKI ditumpas, lahirah masa Orde Baru ● Undang-Undang Perbankan tahun 1968 diberlakukan ● Kebijaksanaan 3 Oktober 1966 yang mengambil langkah-langkah di bidang keuangan negara, moneter dan perdagangan yang berkesan pada : 		<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan yang ada tidak dilaksanakan secara konsisten ● Stabilitas politik tidak ada, bahkan terjadi pemberontakan PKI tahun 1965. ● Tenaga pendukung (administrasi) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana masih sangat lemah bahkan semakin diperlemah karena adanya inflasi yang tidak terkendali ● Rencana ini pada dasarnya hanya untuk mendinginkan situasi politik yang sedang panas
<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang juga merupakan GBHN yang pertama <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kemakmuran rakyat/ masyarakat (GNP) dengan memperbaharui kebijaksanaan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kembali dari pada semua landasan-landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan agar diperoleh keseimbangan yang 		<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Program ini dilandasi ketetapan MPRS sehingga mempunyai nilai politik ● Dalam rencana ini dirumuskan secara tajam adanya sekala prioritas nasional yakni bidang ekonomi ● Skala prioritas dalam bidang ekonomi juga menegaskan adanya patokan utama yakni dilaksanakannya proyek-proyek yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan bagi keperluan rakyat banyak ● Dalam operasionalnya, dibedakan dengan jelas antara program stabilisasi dan rehabilitasi dengan program pembangunan

<ul style="list-style-type: none"> - penertiban keuangan negara yang serba sulit pengaturan kembali urusan moneter dan dunia perbankan - memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem jatah yang tidak wajar dan oleh peraturan berbelit-belit yang mematickan inisiatif rakyat/masyarakat ● Kebijaksanaan ini berintikan bertujuan membendung laju infalsi 	<p>tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 3. Stabilisasi dan rehabilitasi yang mencakup : (jangka pendek) <ul style="list-style-type: none"> - pengendalian inflasi - pencukupan kebutuhan pangan - rehabilitasi prasarana ekonomi - peningkatan kegiatan ekspor - pencukupan kebutuhan sandang <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan yang terencana dan konsisten (jangka panjang) yang skala prioritasnya adalah : <ul style="list-style-type: none"> - bidang pertanian - bidang prasarana - bidang industri 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dibedakannya antara pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi ● Diberlakukannya kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang konsisten disertai dengan penertiban keuangan pemerintah melalui kebijaksanaan APBN yang seimbang. ● Kebijaksanaan dalam bidang ekonomi tersebut adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan-peraturan 3 Oktober 1966 b. Peraturan bulan Pebruari 1967 c. Peraturan 28 Juli 1967 ● Kehidupan politik yang relatif stabil
<p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Harga barang-barang ekspor Indonesia di pasaran Internasional menurun. Dan juga merosotnya hasil produksi barang-barang ekspor, menurunnya mutu, kekurangan bahan-bahan baku/penolong serta peralatannya, keadaan infrastruktur yang menghambat jalannya ekspor. ● Aspek administrasi yang belum menunjang ● Mulai dikembangkannya secara relatif cepat barang-barang sintetis di negara maju sehingga mengurangi permintaan produk Indonesia. ● Peranan sektor pertanian yang masih tinggi 		

<p>6. Periode 1969/70 - 1973/74</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dalam Repelita I sasaran utama yang hendak dicapai adalah meningkatkan produksi nasional dengan tetap mempertahankan stabilisasi ● Kebijaksanaan industri dilakukan sebagai industri pengganti barang-barang import (yang perlu diproteksi) yang pada dasarnya merupakan benih ekonomi biaya tinggi ● Untuk mengatasi kekurangan dana pemerintah memberlakukan kebijaksanaan pinjaman luar negeri dan mengundang modal asing ● Kebijaksanaan ekonomi yang menonjol dalam Repelita I adalah : ● Peraturan Pemerintah no. 16 Tanggal 17 April 1970 ● Pada tanggal 23 Agustus 1971 pemerintah mengubah kurs rupiah dari Rp 378,- menjadi Rp 415,- untuk US \$ 1 ● Pertumbuhan ekonomi periode 1970 s/d 1975 adalah +/- 6,5 % 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TAP MPRS XXIII/MPRS/1966 <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan GNP dengan tetap menjaga stabilisasi ekonomi dan pada saat yang bersamaan meningkatkan investasi di sektor yang diprioritaskan (pertanian, prasarana, industri). Sasarannya adalah perombakan struktural perekonomian Indonesia 	<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat inflasi sudah dapat dikendalikan dan disiplin penggunaan keuangan pemerintah semakin mantap yang nampak dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Dengan perkataan lain perekonomian nasional sudah semakin stabil ● Pemberlakuan kebijaksanaan baru pemerintah di bidang perdagangan, ekspor-impor dan devisa yang dituangkan dalam peraturan pemerintah R.I. no. 16 tahun 1970 ● Dialokasikannya dana dalam APBN untuk pembangunan pedesaan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya ● APBN tetap dipertahankan seimbang ● PMDN dan PMA yang semakin meningkat ● Situasi politik yang semakin stabil ● Repelita memiliki dasar politis yang kuat yaitu berpedoman pada TAP MPR ● Segi administrasi dan kelembagaan yang mulai berkembang (berfungsi) <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dalam perekonomian yang semakin terbuka, Indonesia semakin dipengaruhi oleh fluktuasi perekonomian internasional
--	---	--

<p>7. Periode 1974/75 - 1978/79 Repelita II</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada periode ini harga minyak bumi meningkat pesat sehingga meningkatkan dana pembangunan ● Devaluasi Rupiah tanggal 15 Nopember 1978, dari Rp 415,-/US \$ 1,- menjadi Rp 625,-/US \$ 1,- ● Target pertumbuhan yang hendak dicapai 7,5 % 		<ul style="list-style-type: none"> ● Daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, kurang mendukung berkembangnya industrialisasi, khususnya pengganti barang-barang impor ● Semakin dirasakannya perbedaan/kesenjangan pendapatan antar golongan dan juga antar daerah. karena investasi yang dilakukan ternyata padat modal dan terpusat di daerah-daerah tertentu (khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dst.) ● Krisis moneter dunia ● Pengawasan pembangunan yang masih lemah
<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GBHN 1973 <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan GNP dengan sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat 2. tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan , terutama untuk rakyat banyak 		<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stabilitas ekonomi tetap dapat dipertahankan yaitu dengan tetap mempertahankan APBN yang seimbang ● Harga minyak bumi yang meningkat pesat ● Situasi politik yang relatif stabil <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peranan pemerintah yang semakin dominan, menghambat partisipasi rakyat/masyarakat

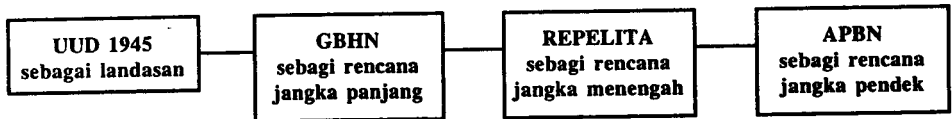
<ul style="list-style-type: none"> ● Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk wilayah-wilayah pembangunan ● Krisis Pertamina, tidak mempunyai Pertamina melunasi utang jangka pendeknya ● Krisis beras akibat kemarau panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keadaan prasarana yang semakin meluas dan sempurna 4. Kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata 5. Memperluas kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perekonomian Internasional yang mulai dihindangi krisis yang mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor di luar minyak. Di pihak lain kebutuhan devisa untuk impor meningkat
<p>8. Periode 1979/80 - 1983/84 Repelita III</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Repelita III memberikan perhatian yang lebih mendalam pada peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya ● target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 6,5 % 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 ● TAP MPR no IV/MPR/1978 (GBHN) ● TAP MPR no VII/MPR/78 ● Keputusan Presiden T.I. no. 59/M Tahun 1978 <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 % dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 	<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sasaran yang ingin dicapai diikuti oleh kebijaksanaan pada bidangnya yang konsisten ● Tingkat inflasi dapat dikendalikan ● Situasi ekonomi pada umumnya sudah lebih baik sehingga memungkinkan pertumbuhan, khususnya sektor informal <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gejala ekonomi dunia yang belum juga mereda ● Harga minyak bumi yang mulai mengendor sehingga sangat mengurangi penerimaan pemerintah

<ul style="list-style-type: none"> ● Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 mulai diberlakukan. Sementara itu masalah 'deregulasi' dan 'debirokratisasi' muncul secara mencolok ● Mulai 1 Januari 1984 diberlakukan Undang-Undang Pajak yang baru ● Indonesia mulai swasembada beras ● Devaluasi Rupiah tanggal 31 Maret 1983 dari Rp 625,- menjadi Rp 970,- per US \$ 1,- ● Perberlakuan Keputusan Presiden no. 10/1980 tentang sentralisasi pengadaan keperluan pemerintah ● Inpres no. 51/1984 	<p>3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Asas pemerataan tampil sangat tajam dalam Repelita III yaitu dengan dituangkannya 8 jalur pemerataan</p>	
<p>9. Periode 1984/85 - 1988/89 Repelita IV</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Catatan : ● Sasaran pertumbuhan dalam Repelita IV adalah 5 % ● Dalam bidang politik diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik serta organisasi kemasyarakatan lainnya demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa 	<p>Landasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 ● TAP MPR n0 II/1983 tentang GBHN ● TAP MPR no. /1983 mengenai pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penguasaan dan pengamanan pembangunan nasional ● Keputusan Presiden n0.7/1979 tentang Repelita III ● Keputusan Presiden n0 45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembanguan IV 	<p>Yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ekspor barang non-migas dapat meningkat Bahkan pada tahun terakhir Repelita IV telah dapat melampaui nilai ekspor minyak bumi ● Penerimaan dalam negeri meningkat khususnya setelah diberlakukannya undang-undang Perpajakan 1 Januari 1984 ● Dilanjutkan dan dikembangkannya pemberian kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), dan kredit candak kulak (KCK)

<ul style="list-style-type: none"> ● Deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijaksanaan yang menyolok dalam kurun waktu Repelita IV ● Diumumkan devaluasi pada tanggal 12 September 1986 yang diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang menunjang kebijaksanaan devaluasi ● Pemberlakuan Inpres no. 4/1985 tanggal 4 April 1985 mengenai penggunaan SGS sebagai upaya meniadakan ekonomi biaya tinggi ● Pengaktifan kembali penggunaan instrumen moneter berupa fasilitas diskonto ulang, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang. ● APBN 1986/1987 volumenya secara absolut menurun dari APBN tahun sebelumnya ● Rephasing investasi-investasi besar ● Pemberlakuan Paket 6 Mei 1986 untuk meningkatkan daya kompetisi ekspor non-migas dan menarik penanaman modal ● Perberlakuan keputusan 25 Oktober 1986 dan 15 Januari 1987 yang pada dasarnya untuk sebagian meniadakan adanya importir tertunjuk ● Pembayaran utang luar negeri melampaui DSR 	<p>Startegi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita selanjutnya. Sejalan dengan itu pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain akan semakin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tetap dipertahankannya APBN yang seimbang, serta inflasi tetap dapat terkendali ● Kegiatan investasi tetap berjalan <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sumber penerimaan dari minyak bumi menurun sangat tajam ● Proteksi yang diberlakukan oleh negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat yang merupakan pasar barang ekspor Indonesia terbesar ● Perekonomian Internasional yang masih belum menentu ● Menurunnya nilai dolar terhadap mata uang asing lainnya sehingga melipat gandakan utang Indonesia
---	---	---

- Pemberlakuan kebijaksanaan 25 Oktober 1986 dan 15 Januari 1987
- Terjadi 'mini krisis' pada Sept. 1984 dan pembelian cadangan devisa Des. 1986, terakhir ini diatasi dengan 'gebrakan Sumartini'

Sejak dimulainya masa Orde baru sebenarnya perencanaan ekonomi Indonesia telah dijabarkan dalam beberapa fase perencanaan, yakni :



Sedangkan sebagai lembaga perencana yang ada di Indonesia adalah :

BAPPENAS, sebagai Badan Perencanaan pembangunan di Indonesia, merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Badan ini memiliki fungsi membantu Presiden di dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menilai pelaksanaannya

BAPPEDA tingkat I untuk melaksanakan perencanaan daerah tingkat I (Propinsi), dan **BAPPEDA tingkat II** untuk melaksanakan perencanaan daerah tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya)